

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dengan langkah wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung ke lokasi penelitian, maka kesimpulan yang dapat ditarik yaitu :

1. Peran pemerintah sebagai Motivator, dalam menghentikan (PETI), peran pemerintah daerah sebagai motivator diperlukan agar usaha pemberhentian pertambangan batu emas ilegal terus berjalan. Serta memberikan himbauan kepada masyarakat untuk menghentikan pertambangan liar dan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan agar pemberhentian pertambangan (PETI) berjalan dengan lancar.
2. Fasilitator, Sebagai fasilitator pengembangan dalam pemberhentian pertambangan batu emas ilegal. Seperti dengan bergabung dengan PT.Indotan akan mengurangi jumlah penduduk yang melakukan penambang liar.
3. Dinamisator, agar pemberantasan tambang liar dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah, swasta dan masyarakat harus dapat bersinergi dengan baik.

5.2 Saran

- a. saran kepada masyarakat adalah diharapkan bagi seluruh masyarakat Desa Lamunga untuk tetap mematuhi dan menjalankan aturan-aturan maupun kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah maupun instansi lainnya yang ada di Desa Lamunga terkait dengan kegiatan penambang emas ilegal yang sudah cukup luas keberadaannya di Desa Lamunga dan hampir seluruh masyarakat Desa Lamunga bekerja sebagai penambang emas ilegal.

- b. kepada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat untuk tetap memberikan arahan, himbauan maupun masukan yang dapat diterima oleh masyarakat Desa Lamunga terkait dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dalam melakukan penambangan emas ilegal. Pemerintah menyiapkan lapangan kerja terbaru kepada masyarakat kabupaten sumbawa barat memfasilitasi bentuk keluhan masyarakat. Serta pemerintah memperbaiki lahan lahan yang rusak rusak akibat penambang liar.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, H. (2002). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai pustaka.
- Amba, M. (1998). *Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat*. Pascasarjana, IPB, Bogor
- Aslam1., Adys1, A, k., Hardi1, k. (2016). Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Penambangan Ilegal Nikel di Kabupaten Kolaka Utara. (10), 2., p:122-136.
- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dyahwanti. (2007). *Intraksi Aktor dalam Pelaksanaan pertambangan Liar di Kabupaten Kolaka Utara*. Universitas Negeri Makassar : Skripsi.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Iskandar. (2010). *Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Rajagrafindo.
- Muluk, K. (2005). *Desentralisasi Dan Pemerintahan Daerah*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Nn. (2007). *Fasilitasi Pengembangan Kelompok Dalam Pengembangan Masyarakat*. surakarta : yayasan Indonesia sejahtera.
- Putra, M. (2016). Kebijakan pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup akibat pertambangan emas tanpa izin (peti) Tahun 2013-2015. *JOM FISIP*, (3), 2., p:1-15.
- Pitana, I.G dan Gayatri, P.G. (2005). *Sosiologi Pertambangan ilegal*. Yogyakarta: Andi.
- Purwanto. (1994). *Peran Pemerintah Kelurahan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kelurahan Mataallo Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa*. UNM: Skripsi.
- Sarwono. (1991). *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Saputra, R.P. (2015). Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pertambangan Emas Liar Golongan B Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kampar Kiri. *Jom Fisip*, (2), 1., P:1-15.
- Soekanto. (1983). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2001). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- _____. (2004). *Sosiologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali.
- Sugiyono.(2009).*Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif)*.Bandung:
Alfabeta.
- Sunaryo,B.(2013).Kebijakan Pembangunan Destinasi Pertambangan
Ilegal.yogyakarta: Gava Media.
- Supramono.(2012).*Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*.
Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Thoha,M.(1997).*Pembinaan Organisasi(proses diagnosa dan intervensi)*.Jakarta:
PT. Raja Gravindo Persada.

LAMPIRAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS AKREDITASI "B"**

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Tlp. 639180-6633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD MAULANA
NIM : 21511A0053
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Dosen Pembimbing I : Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., M.M.

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1	16/7/19		Tata bahasa	<i>F</i>
2	18		Ace diuji	<i>F</i>
3				
4				
5				

Mataram, Juli 2019

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik

• (Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.)
NIDN. 0822098901

Dosen Pembimbing I

Dr. H. Ibrahim Abdullah, S.E., M.M.
NIDN. 0830125501



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS AKREDITASI "B"**

Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 1 Tlp. 639180-6633723 Mataram

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD MAULANA
NIM : 21511A0053
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Dosen Pembimbing II : Abdul Kharis, S. E., M. M.

No	Hari dan Tanggal		Materi Konsultasi	Paraf Pembimbing
	Masuk	Keluar		
1			Pembahasan kerang tajan	
2			Simpulan B Sama sesuaian	
3			acc 08/07/2019	
4				
5				
6				
7				

Mataram, Juli 2019

Mengetahui,

Kaprodi Administrasi Publik

(Rahmad Hidayat, S. AP., M. AP.)
NIDN. 0822098901

Dosen Pembimbing II

(Abdul Kharis, S. E., M. M.)
NIDN. 0821117603



UMMAT

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
STATUS TERAKREDITASI "B"**

Jalan K. H. Achmad Dahlan No. 1 Telp. 639180-633723 Mataram

E-mail : fisisipol.ummat@gmail.com

BERITA - ACARA

Pada hari ini Kamis Tanggal Duapuluhempat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Sembilanbelas telah diselenggarakan Ujian Skripsi bertempat di Ruang Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT) dan dinyatakan LULUS / ~~TIDAK LULUS~~ dengan predikat ~~CEKUP~~ / MEMUASKAN / SANGAT MEMUASKAN / ~~GUA LAUDE~~, Mahasiswa :

Nama : MUHAMMAD MAULANA
 Nomor Mahasiswa : 21511A0053
 Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram
 Judul Skripsi : "PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TAMBAHAN BATU EMAS ILEGAL DI DESA LAMUNGAN KECAMATAN TALIWANG KAB. SUMBAWA BARAT"

Rekap Nilai dari masing-masing Dosen Penguji sebagai berikut :

No	Nama Dosen Penguji	Jabatan	Indeks Prestasi
1	Dr. H. Ibrahim Abdullah, MM NIDN. 0830125501	Penguji Ketua	3.5
2	Abdul Kharis, SE, MM NIDN. 0821117603	Penguji Anggota 1,	3.13
3	Mardiah, S.Sos. M.Si NIDN. 0804117201	Penguji Anggota 2,	3.32
TOTAL			9.95

Jumlah Ip
 IPK : ----- = $\frac{9.95}{3} = 3.32$
 Jmlh Penguji 3

Mataram, 24 Juli 2019

TEAM PENGUJI SKRIPSI

Penguji Ketua,

Dr. H. Ibrahim Abdullah, MM
NIDN: 0830125501

Penguji Anggota 1,

Abdul Kharis, SE, MM
NIDN: 0821117603

Penguji Anggota 2,

Mardiah, S.Sos. M.Si
NIDN. 0804117201

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.



Nama : MUHAMMAD MAULANA
 Nomor Mahasiswa : 215111/0053
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KEF.
1	Sistematika	2	3,2	6,4	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,3	6,6	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,0	6,0	
4	Methodologi	3	3,0	9,0	
5	Penyajian Data	3	3,3	9,9	
6	Analisa Data	4	3,0	12,0	
7	Kesimpulan	2	3,0	6,0	
8	Konsistensi Bahasa	3	3,0	9,0	
9	Bahasa	2	3,2	6,4	
10	Sikap	2	3,5	7,0	
JUMLAH		25		78,3	

$$\text{IPK} = \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{78,3}{25} = 3,13$$

Mataram, 24 Juli 2019
 Penguji Anggota I,

Abdul Kharis, SE. MM
 NIDN: 0821117603

Lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : MUHAMMAD MAULANA
 Nomor Mahasiswa : 21511A0053
 Jurusan : Urusan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	4	8	
2	Latar Belakang / Alasan	2	4	8	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3	6	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3	12	
7	Kesimpulan	2	3	6	
8	Konsistensi Bahasa	3	3	9	
9	Bahasa	2	4	8	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25		83	

$$\text{IPK} = \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{83}{25} = 3.32$$

Mataram, 24 Juli 2019
 Penguji Anggota II,



Mardiah, S.Sos, M.Si
 NIDN: 0804117201


lampiran : Berita Acara Ujian Skripsi Sarjana Lengkap Strata Satu Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Nama : MUHAMMAD MAULANA
 Nomor Mahasiswa : 21511A0053
 Jurusan : Hubungan Publik
 Program Studi : Administrasi Publik
 Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Mataram

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI	B X N	KET.
1	Sistematika	2	3,5	7	
2	Latar Belakang / Alasan	2	3,5	7	
3	Wawasan Pengetahuan	2	3,5	7	
4	Methodologi	3	3	9	
5	Penyajian Data	3	3	9	
6	Analisa Data	4	3,5	14	
7	Kesimpulan	2	4	8	
8	Konsistensi Bahasa	3	3,5	10,5	
9	Bahasa	2	3,5	7	
10	Sikap	2	4	8	
JUMLAH		25		86,5	

$$\text{IPK} : \frac{\text{TOTAL BN}}{\text{TOTAL B}} = \frac{86,5}{25} = 3,5$$

Mataram, 24 Juli 2019
 Penguji Utama,



Dr. H. Ibrahim Abdullah, MM
 NIDN: 0830125501

Lampiran 1 :

**Menuskrip Wawancara Persiapan Desa Lamunga Kecamatan Taliwang
Kabupaten Sumbawa Barat**

Tanggal	Informen	Data Teks
15-03-2019	Bapak Muslimin masyarakat desa Lamunga.	<p>1. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi pelaku pertambangan ilegal? Kalau peran pemerintah sudah melakukan sosialisasi, dan bersurat kepada pemerintah desa tentang penutupan tambang ilegal.</p> <p>2. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menertibkan pertambangan ilegal? Untuk pemberhentihan tambang ilegal membutuhkan proses dari pemerintah daerah dan semua pihak dari pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat di Desa Lamunga. Dan ada beberapa kesepakatan antara masyarakat lamunga dengan pemerintah daerah itu yang pertama sosialisasi dulu tentang tambang, dan yang kedua tentang lingkungan, yang ketiga solusi masyarakat selesi menambang itu apa yang harus di lakukan.</p> <p>3. Bagaimana strategi pemerintah memfasilitasi masyarakat agar lingkungan tidak tercemar? Memang pemerintah sudah memberikan</p>

		<p>sosialisai seperti itu banyak yang sudah melaksanakan termasuk tempat pembuangan limbahnya dikasih bagus, pengelolaan tidak pakai merkuri juga sudah di kasih himbauan dan ada beberapa sudah melaksanakan tidak memakai merkuri dalam menambang.</p> <p>4. Bagaimana strategi untuk memotivasi pelaku pertambangan ilegal? Kalau positifnya kesejahteraan penduduk lamunga ini rata-rata itu sudah bagus, ekonominya sudah meningkat, kalau negatifnya lingkungan, perlu ada penataan lingkungan kita berikan pemahaman positif kepada masyarakat ini loh cara mengelolah dengan baik, sampai saat ini masalah penyakit atau sebagai belum ada dan tidak banyak memakan korban</p> <p>5. Upaya apa saja yang sering dilakukan untuk memotivasi? Dengan adanya sosialisasi dan teguran dari pemerintah itu tidak ada pengurangi jumlah penambang ilegal, malahan penambang ilegal ini adalah masyarakat setempat. Mereka ada yang menambang di lahannya sendiri dan ada yang menambang di lahan produksi dan tidak ada menambang di hutan lindung.</p>
--	--	---

		<p>6. Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku pertambangan ilegal bergerak searah tujuan dalam menertibkan pertambangan ilegal?</p> <p>Untuk menertibkan solusinya dari semua aitem ini berilah perizinan kepada masyarakat seperti yang tercantum di UU Menerba itu pasal 21, 22 dan 24 diberikan izin per 1 kelompok 18 Ha baru bisa berproduksi.</p> <p>7. Apakah pemerintah sering kali melakukan teguran untuk tidak melakukan pertambangan ilegal?</p> <p>Sering kali melakukan teguran dari pemerintah itu tidak ada pengurangi jumlah penambang ilegal, malahan penambang ilegal ini adalah masyarakat setempat.</p>
16-03-2019	Bapak Awaluddin masyarakat desa Lamunga.	<p>1. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi pelaku pertambangan ilegal?</p> <p>Peran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat terhadap kegiatan penambang emas ilegal ialah melakukan pembinaan dibidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran. Pemerintah juga berperan dalam memberikan pengawasan teknis pada usaha</p>

		<p>pertambangan rakyat berupa keselamatan dan kesehatan kerja, pengelolaan lingkungan hidup, dan pasca tambang.</p> <p>2. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menertibkan pertambangan ilegal?</p> <p>Peran pemerintah yang diberikan kepada masyarakat untuk menertibkan pertambangan ilegal ialah pemerintah harus turun tangan langsung ke lapangan dalam menertibkan pertambangan illegal tersebut. Yang dapat pemerintah lakukan ialah mengatur, mengawasi dan menindak lanjuti. Dimana istilah mengatur ini adalah mengatur segala kebutuhan di sector pertambangan seperti UU yang mengatur tata laksana, pengolahan, perijinan maupun hal-hal lain yang dapat menjamin pelaksanaan pertambangan semestinya. Kalau mengawasi disini berupa pengawasan dibidang kesehatan dan keselamatan kerja serta keselamatan dibidang oprasional pertambangan. Sedangkan menindak lanjuti berupa pemberian sanksi kepada penambang illegal berupa peringatan tertulis, pencabutan izin maupun tindakan hukum.</p> <p>3. Bagaimana strategi pemerintah</p>
--	--	---

		<p>memfasilitasi masyarakat agar lingkungan tidak tercemar?</p> <p>Strategi pemerintah dalam memfasilitasi masyarakat mengenai tercemarnya lingkungan karena penambangan ilegal itu ialah membuat peraturan daerah berbasis lingkungan, mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup dan mendorong penanggung jawab pertambangan melakukan audit lingkungan bagi kegiatan yang dianggap berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau perilaku yang menunjukkan ketidak taatan terhadap perundang-undangan yang ada.</p> <p>4. Bagaimana strategi untuk memotivasi pelaku pertambangan ilegal?</p> <p>Jadi pemerintah kabupaten sumbawa barat menjadikan kewenangan pemerintah sebagai daerah otonom yakni kewenangan untuk mengatur sendiri. Serta memberikan kewenangan yang luas lebih nyata kepada masyarakat dan bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing.</p>
--	--	--

		<p>5. Upaya apa saja yang sering dilakukan untuk memotivasi?</p> <p>Upaya yang sering dilakukan oleh pemerintah KSB sejak 4 maret 2019 memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas baik itu kepada pemilik gelondong penambang peti di seluruh wilayah maupun masyarakat secara umum</p> <p>6. Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku pertambangan ilegal bergerak searah tujuan dalam menertibkan pertambangan ilegal?</p> <p>Kapolres KSB AKBP mustofa SIK.,MH mengatakan hingga saat ini sudah ada sekitar ratusan lubang PETI yang sudah mulai di tutup paksa. Karena di khawatirkan akan menimbulkan akan menimbulkan masalah yang baru dan berakibat kepada gangguan khamtibmas.</p> <p>7. Apakah pemerintah sering kali melakukan teguran untuk tidak melakukan pertambangan ilegal?</p> <p>Pemerintah sudah sering melakukan teguran atau arahan daam bentuk sosialisasi. Pemerintah sudah banyak kali melakukan sosialisasi akan tetapi tetap saja masih ada masyarakat yang melakukan penambangan secara illegal malahan semakin banyak</p>
--	--	---

		<p>masyarakat yang melakukan penambangan ilegal yang dikarenakan masyarakat yang melakukan penambangan ilegal adalah masyarakat Desa Lamunga itu sendiri. Hal itu terjadi dikarenakan pola tingkah laku masyarakat yang belum sadar akan peraturan hukum sehingga kerap terjadinya pelanggaran aturan perundang-undangan, lemahnya pengawasan oleh pihak terkait serta kurangnya dan lemahnya kordinasi antar lembaga.</p>
03-04-2019	<p>Bapak Samsudin, S.P Sekretaris Desa Persiapan Lamunga.</p>	<p>1. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi pelaku pertambangan ilegal? Kami dari desa hanya dapat mensosialisasi bagaimana tambang ini supaya bisa tertib bisa nda terlalu pencemaran lingkungan.</p> <p>2. Bagaimana pemerintah berperan untuk memfasilitasi masyarakat untuk menertibkan pertambangan ilegal? Kami atur sebagian rupa agar semua tempat gelondong itu di pasang semen semua supaya nda tercemar nda mengalir kesana kemari lalu di pasang semen dan pondasi.</p> <p>3. Bagaimana strategi pemerintah memfasilitasi masyarakat agar lingkungan tidak tercemar? Semua tempat penampungan air nya limbah</p>

		<p>itu disemen supaya nda tercecce keluar itu cara mengatasinya.</p> <p>4. Bagaimana strategi untuk memotivasi pelaku pertambangan ilegal? Jadi kami sebatas itu memberi masukan dan memberi saran agar supaya tidak tercemar lingkungan.</p> <p>5. Upaya apa saja yang sering dilakukan untuk memotivasi? Mensosialisasi bagaimana tambang ini supaya bisa tertib.</p> <p>6. Bagaimana cara atau upaya agar seluruh pelaku pertambangan ilegal bergerak searah tujuan dalam menertibkan pertambangan ilegal? Kami dari desa hanya dapat mensosialisasi bagaimana tambang ini supaya bisa tertib bisa nda terlalu pencemaran lingkungan kan kami atur sebagian rupa agar semua tempat gelondong itu di pasang semen semua supaya nda tercemar nda mengalir kesana kemari lalu di pasang semen dan pondasi pokok semua tempat penampungan air nya limbah itu disemen supaya nda tercecce keluar itu cara mengatasinya.</p> <p>7. Apakah pemerintah sering kali melakukan teguran untuk tidak melakukan pertambangan ilegal?</p>
--	--	--

		<p>Sering terjadi teguran pemerintah kalau kami membendung sama sekali mau melarang mereka untuk itu kan susah juga itu kan mereka mencari kehidupan juga disitu Jadi kami sebatas itu memberi masukan dan memberi saran agar supaya tidak tercemar lingkungan.</p>
--	--	---

Lampiran 3 :

Foto Wawancara Dengan Informan







